

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Semendawai, Abdul Haris, et.al, 2011, *Memahami Whistle Blower*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Syarbibi, Amirulloh dan Muhammad Arbain, 2014, *Pendidikan Anti Korupsi: Konsep, Strategi, dan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah/Madrasah*, Bandung: Alfa Beta.
- Arikunto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Artantojati, Sigit, 2010, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (justice collaborators) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunakaya, Widiada dan Petrus Irianto, 2012, *Kebijakn Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Hamzah, Andi, 1984, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahan*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Echols, Jhon M dan Hasan Shadili, 2005, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

- Ranuhandoko, I. P. M., 2003, *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, K. Wantjik, 1977, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sasmita, Romli Atmi, 2004, *Teori Dan Kapita Selektu Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco.
- Siswanto, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Supriyadi, 2002, *Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Legislaif Dalam Perundang-undangan Pidana di Indonesia*, Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2013, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suradi, 2014, *Pendidikan Antikorupsi*, Yogyakarta: Gava Media.
- Suyatno, 2005, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Gunakaya, Widiada dan Petrus Irianto, 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Bandung.
- Wijaya, Firman, 2011, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yanto, Oksidelfa, 2010, *Mafia Hukum Membongkar Konspirasi dan Manipulasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penebar Swadaya Group.

Internet:

Indonesia Corruption Watch, *Manifesto Gerakan Anti Korupsi ICW*, dalam <http://www.antikorupsi.org/id/icw>. diunduh senin 25 januari 2015 pukul 11.14 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Penanggulangan* dalam <http://kbbi.web.id>. diunduh rabu 01 Oktober 2015 pukul 15.05 Wib.

Pratama, Ray, *Upaya Penanggulangan Kejahatan* dalam <http://raypratama.blogspot.com> diunduh rabu 01 Oktober 2015 pukul 15.05 Wib.

Transparency Internasional Indonesia, 2010, *Corruption Perception Index 2013*, dalam <http://Transparency International Indonesia.com> diunduh senin 24 Agustus 2015 pukul 12.12 Wib.

Transparency International Indonesia, *Transparency International Indonesia*, dalam <http://www.ti.or.id/index.php/profile/ti-indonesia>, diunduh senin 25 januari 2015 pukul 11.14 Wib.

Makalah:

Semendawai, Adul Haris, 2013, *Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Proses Peradilan Pidana* (Makalah tidak diterbitkan), Jogjakarta: Stadium General Fakultas Hukum UII.

Arief, Barda Nawawi 30 Juli 2005, *Beberapa Masalah Penegakkan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi*, Cirebon: disajikan pada seminar CLC & FH UNSWAGATI.

Undang-undang:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) setelah Amandemen.

Moeljatno, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara..

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku (*justice collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor. M.HH-11.HM.03.02.th,2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.